



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **35** TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Klasifikasi Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dianut dan diterima oleh instansi vertikal, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
9. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
11. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Kementerian dan perangkat daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO. BENTUK/BAWAH/PERUSAHAAN DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	
2	Acc. Adm. Umum	
3	Kadis Perpustakaan	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **4-8-2023**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **4-8-2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


ABDULRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **35**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR **35** TAHUN 2023
 TENTANG
 KODE KLASIFIKASI ARSIP DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
000	UMUM	
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
	000.1.1	Telekomunikasi
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
	000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
	000.1.5	Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
	000.1.7.1	Pengurusan Surat-Surat Kendaraan Dinas
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan Perbaikan
	000.1.7.3	Pengurusan Kehilangan dan Masalah Kendaraan
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman, dan Peralatan Kantor
	000.1.8.1	Pertamanan/ <i>Landscape</i>
	000.1.8.2	Penghijauan
	000.1.8.3	Perbaikan Gedung
	000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
	000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
	000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
	000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
	000.1.9.1	Perbaikan /Pemeliharaan
	000.1.9.2	Pemasangan
	000.1.10	Ketertiban dan Keamanan
	000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
	000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
	000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir
	000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, dan Pegawai Lainnya
	000.2	PERLENGKAPAN
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan
	000.2.1.1	Data Hasil Inventarisasi dan Penyimpanan
	000.2.1.2	Laporan dan Evaluasi Inventarisasi dan Penyimpanan
	000.2.2	Pemeliharaan Peralatan Kantor
	000.2.2.1	Data Hasil Pemeliharaan Kantor
	000.2.2.2	Laporan dan Evaluasi Pemeliharaan Kantor
	000.2.3	Distribusi
	000.2.3.1	Barang Habis Pakai
	000.2.3.2	Barang Milik Daerah
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang Dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD Termasuk di dalamnya Proses Lelang Penghapusan
	000.2.5	Pengelolaan <i>Database</i> Barang Milik Daerah

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
000.3	PENGADAAN	
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa, Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan, Penetapan Kebijakan Umum, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
	000.3.2	Pengadaan Langsung, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak
	000.3.4	Swakelola, antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Database Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Database Kontrak, Database Pengadaan Barang/Jasa
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan Hasil Evaluasi
000.4	PERPUSTAKAAN	
	000.4.1	Kebijakan di Bidang Perpustakaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
	000.4.3	Koleksi Pustaka
	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar Menukar
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
	000.4.3.6	Terbitan Internal
	000.4.3.7	Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi
	000.4.6	Layanan Perpustakaan
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan Gemar Baca
	000.4.7	Kerja Sama Perpustakaan
	000.4.7.1	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian Kerja Sama
	000.4.7.3	Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerja Sama Internasional
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
	000.4.8.1	Pengembangan Situs Web
	000.4.8.2	Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan Pangkalan Data Perpustakaan Digital
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
	000.4.10	Konservasi
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
	000.4.12	Transformasi Digital
	000.4.13	Kurasi Digital
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5	KEARSIPAN	
	000.5.1	Kebijakan di Bidang Kearsipan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
	000.5.2.1	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	000.5.2.5	Database Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Database Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana, dan Sarana Kearsipan
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladanan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis
	000.5.3.1	Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik
	000.5.3.4	Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis
	000.5.4	Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga
	000.5.6	Penyusutan Arsip
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang Dipindahkan
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip, Meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk Pemusnahan Arsip dengan Retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis, Meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen Rapat Panitia, Surat Pertimbangan Panitia Penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Digunakan dari Pencipta Arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan
	000.5.7	Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan Alih Media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan
	000.5.8	Database Pengelolaan Arsip Dinamis
	000.5.8.1	Database Pengelolaan Arsip Aktif
	000.5.8.2	Database Pengelolaan Arsip Inaktif
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis
	00.5.9.1	Akuisisi, Meliputi: Monitoring Fisik dan Daftar, Verifikasi terhadap Daftar Arsip, Menetapkan Status Arsip Statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan Arsip yang Diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang Diserahkan
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3	Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi Kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain Sesuai Perkembangan TI) dan Transkrip
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: Pengumuman, Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis, <i>Guide</i>
	000.5.9.6	Preservasi Preventif, antara lain: Penyimpanan, Pengendalian Hama Terpadu, Reproduksi (Alih Media)
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan Arsip, Penerbitan Naskah Sumber
	00.5.10	Jasa Kearsipan, antara lain Konsultasi Kearsipan, Manual Kearsipan, Penataan Arsip, Otomasi Kearsipan, Penyimpanan Arsip, Perawatan dan Pemeliharaan Arsip
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
	000.5.12	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana
	000.5.13	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Digabung dan/atau Dibubarkan
	000.5.14	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi
000.6	PERSANDIAN	
	000.6.1	Kebijakan di Bidang Persandian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.6.2	Pengamanan Persandian
	000.6.2.1	Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto
	000.6.2.2	Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto
	000.6.2.3	Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan
	000.6.3	Pengkajian Persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7.	Pelaporan
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program Kerja Tahunan
	000.7.2.7	Penetapan/Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidental
	000.7.2.10	Evaluasi Program
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah
	000.7.6.1	Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategi Daerah
	000.7.6.2	Rapat Pembahasan Rancangan Awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan Akhir Perencanaan Aksi Strategi Daerah
	000.7.6.5	Penerapan Perencanaan Aksi Strategi Daerah
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah
	000.7.7.3	Kerja Sama Pembangunan Nasional
	000.7.7.4	Surat Berharga Svariah Negara
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
	000.8.1	Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	000.8.1.1	Pembentukan
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja
	000.8.2.1	Analisa Jabatan
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
	000.8.3	Ketatalaksanaan
	000.8.3.1	Proses Bisnis
	000.8.3.2	Standar Pelayanan
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
	000.8.3.4	Pelayanan Publik

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	000.8.4	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
		000.8.6.1 Budaya Kerja
		000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
		000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN	
	000.9.1	Kebijakan di Bidang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi
	000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
	000.9.4	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
	000.9.5	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	000.9.6	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		000.9.6.1 Data
		000.9.6.2 Statistik
		000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
	000.9.7	<i>Master Proceeding</i> /Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
	000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Workshop</i>
100	PEMERINTAHAN	
	100.1	OTONOMI DAERAH
	100.1.1	Kebijakan di Bidang Otonomi Daerah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
		100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
		100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
		100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
		100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
		100.1.4.5 Assosiasi Daerah
	100.1.5	Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa
	100.1.6	Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
		100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
		100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
	100.1.7	LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
	100.2	PEMERINTAHAN UMUM
	100.2.1	Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerja Sama

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
		100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
		100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah
		100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
		100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
		100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antarnegara
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM		
	100.3.1	Program Legislasi	
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, Termasuk Naskah Akademik, Rancangan Awal Sampai dengan Rancangan Akhir dan Telaah Hukum Sampai Diundangkan	
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
		100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
		100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
		100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
		100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
		100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
		100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
		100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
		100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
		100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
		100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
	100.3.5	Surat Perintah	
		100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
		100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
		100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
		100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
		100.3.7.1	Dalam Negeri
		100.3.7.2	Luar Negeri
	100.3.8	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang Dijadikan Referensi	
	100.3.9	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
	100.3.11	Kasus/Sengketa Hukum	
		100.3.11.1	Pidana Kasus/Sengketa Pidana, baik Kejahatan maupun Pelanggaran
		100.3.11.2	Perdata Kasus/Sengketa Perdata
		100.3.11.3	Tata Usaha Negara
		100.3.11.4	Perburuhan
		100.3.11.5	Arbitrase

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		100.3.11.6	Sengketa Adat
	100.3.12	Perizinan	
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		100.3.13.1	Hak Cipta
		100.3.13.2	Hak Paten
		100.3.13.3	Hak Desain Industri
		100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
		100.3.13.5	Hak Merk
		100.3.13.6	Permohonan HaKI yang Ditolak
200	POLITIK		
	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	200.1.1	Kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
		200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
		200.1.2.3	Bela Negara
		200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
		200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
		200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen Keamanan
		200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
		200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
		200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
		200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
		200.1.4.1	Ketahanan Seni
		200.1.4.2	Ketahanan Budaya
		200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
		200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
		200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
		200.1.4.6	Fasilitasi
		200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
		200.1.4.8	Laporan Hasil Kerja Sama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
		200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
		200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
		200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
	200.1.5	Politik Dalam Negeri	
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi
		200.1.5.5	Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah
		200.1.5.7	Database Parpol
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
200.2	PEMILU	
	200.2.1	Kebijakan di Bidang Pemilu yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.2.5	Rekanitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
	200.2.3.1	Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Partai Politik
	200.2.3.2	Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik
	200.2.3.3	Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
	200.2.5	Pencalonan Pemilu
	200.2.5.1	Petunjuk Teknis Pencalonan
	200.2.5.2	Surat Pencalonan Pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar Bakal Calon
	200.2.5.4	Dokumen Persyaratan Masing-Masing Bakal Calon
	200.2.5.5	Dokumen Verifikasi Administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.6	Kampanye Pemilu
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Kampanye
	200.2.6.2	Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye
	0200.6.3	Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye
	200.2.7	Dana Kampanye
	200.2.7.1	Pedoman Audit Dana Kampanye
	200.2.7.2	Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan Hasil Audit Dana Kampanye
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang Desain dan Spesifikasi Surat Suara
	200.2.8.2	Master Surat Suara
	200.2.8.3	Surat Suara yang Terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak Terpakai (Rusak, Salah, dan Tidak Digunakan)
	200.2.8.5	Formulir Pemilu di Pemerintah Daerah
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.1	Surat-Surat Mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan Kesimpulan Termohon
	200.2.10.3	Salinan Putusan Lembaga Peradilan
	200.2.11	Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
	300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	300.1.1	Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang Dilakukan di Pemerintah Daerah
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
	300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN	
	300.2.1	Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
	300.2.2.1	Rencana dan Standardisasi dan Pengawasan dan Perbekalan
	300.2.2.2	Kurikulum dan Silabus, Evaluasi dan Monitoring
	300.2.2.3	Tenaga Pencarian Pertolongan, Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.2.4	Permasyarakatan Pencarian dan Pertolongan, Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.2.5	Perencanaan dan Standardisasi, Penyelenggaraan Operasi SAR, Siaga dan Latihan, Tempat Latihan
	300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
	300.2.5.2	Penyiapan Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
	300.2.8	Operasi Komunikasi
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
	300.2.8.3	Registrasi BEACON
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi
	300.2.12.1	Laporan Harian
	300.2.12.2	Laporan Bulanan
	300.2.12.3	Laporan Tahunan
	300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
	400.1.1	Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang Dijakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan Keterampilan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber Daya Hayati dan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan Evaluasi
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.1.3.1	Fasilitas Transportasi Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitas Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitas Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitas Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitas Energi dalam Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitas Investasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.2	Fasilitas Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.3	Fasilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	400.1.4.4	Fasilitas Kemitraan Usaha
	400.1.4.5	Fasilitas Pengembangan Komoditas Unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan Evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Desa Tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan Inventarisasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitas Pengembangan Masyarakat dan Desa Tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan Evaluasi Masyarakat Tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitas Kerja Sama Antardesa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal
	400.1.5.2	Penguatan Organisasi Masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan Masyarakat
	400.1.5.4	Kerja Sama Antarlembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitas Pengembangan Daerah Perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitas Pengembangan Daerah Rawan Konflik dan Bencana
	400.1.6.3	Fasilitas Pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitas Pengembangan Daerah Pulau Terpencil dan Terluar
	400.1.6.5	Fasilitas Pengembangan Wilayah Strategis
	400.1.6.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	400.2.1	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2.1	Data Gender
	400.2.2.2	Advokasi dan Fasilitas
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data Perlindungan Perempuan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.2.3.3	Advokasi dan Fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan
	400.2.3.5	Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender
	400.2.3.6	Analisis dan Penyajian Informasi Gender
	400.2.3.7	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Ibu
400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan dengan Hukum)	
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	400.2.4.2	Data Perlindungan Anak
	400.2.4.3	Advokasi dan Fasilitasi
	400.2.4.4	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak
	400.2.4.5	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak
400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
	400.2.5.3	Data Tumbuh Kembang Anak
	400.2.5.4	Advokasi dan Fasilitasi
	400.2.5.5	Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak
	400.2.5.6	Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak
	400.2.6	Penghargaan terkait Gender (Anugerah Parahita Ekapraya/ APE)
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3	PENDIDIKAN	
	400.3.1	Kebijakan di Bidang Pendidikan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial
	400.3.2.3	Peringatan Hari Anak
	400.3.2.4	Block Grant
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan Pemberian Bantuan Sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rapat Koordinasi
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
	400.3.5.1	Kurikulum, Bahan Ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi
	400.3.5.4	Lomba, Penghargaan, Penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
	400.3.6	Pendidikan Khusus/Layanan Khusus
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, Festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan Kesejahteraan Guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block Grant
	400.3.8.5	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba, Sayembara, Festival
	400.3.8.7	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan Siswa Miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan Ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block Grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.9.5	Lomba, Sayembara, Jambore, Festival
	400.3.9.6	Kurikulum / Bahan Pembelajaran
	400.3.9.7	Alat Bantu Pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Inklusi)
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Sertifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
	400.3.10.7	Block Grant
	400.3.10.8	Bimbingan Teknis/Sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11.1	Penilaian Akademik
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.12.1	Data Peserta Sidik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4	KEOLAHRAGAAN	
	400.4.1	Kebijakan di Bidang Keolahragaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi
	400.4.3.1	Olahraga Massal
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan, dan Wisata
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.5	Pengembangan	Olahraga Tradisional dan Lavanan Khusus
		400.4.5.1	Olahraga Tradisional
		400.4.5.2	Layanan Khusus
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan	Olahraga
		400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
		400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK	Olahraga
		400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
		400.4.7.2	Kompetisi
		400.4.7.3	IPTEK Olahraga
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi	Keolahragaan
		400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
		400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
	400.4.9	Industri dan Promosi	Olahraga
		400.4.9.1	Industri Olahraga
		400.4.9.2	Promosi Olahraga
	400.4.10	Olahraga Prestasi	
		400.4.10.1	Daerah
		400.4.10.2	Nasional
		400.4.10.3	Internasional
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur	Olahraga
		400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
		400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
		400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5	KEPEMUDAAN		
	400.5.1	Kebijakan di Bidang Kepemudaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda	
		400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
		400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui Forum Kepemudaan)
		400.5.2.3	Pengembangan
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda	
		400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
		400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
		400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda	
		400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
		400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
		400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)	
		400.5.5.1	Pengkajian
		400.5.5.2	Pengembangan
		400.5.5.3	Pendayagunaan (Fasilitasi)
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
		400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
		400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan
	400.5.7	Kewirausahaan	
		400.5.7.1	Kelembagaan
		400.5.7.2	Pengaderan
		400.5.7.3	Perintisan
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
		400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumber Daya
		400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa: Kelembagaan dan Sumber Daya
		400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumber Daya

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber Daya
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6	KEBUDAYAAN	
	400.6.1	Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan Nilai
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah
	400.6.4.6	Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
	400.6.5.1	Internalisasi Nilai Budaya
	400.6.5.2	Kekayaan Budaya
	400.6.5.3	Warisan Budaya Nasional dan Dunia
	400.6.5.4	Diplomasi Budaya
400.7	KESEHATAN	
	400.7.1	Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar
	400.7.2.1	Pelayanan Kedokteran Keluarga
	400.7.2.2	Praktik Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer
	400.7.2.3	Pelaksanaan Kesehatan Primer
	400.7.2.4	Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit
	400.7.2.6	ICD 10, <i>Destistry</i> , dan <i>Stomatology</i>
	400.7.2.7	Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
	400.7.2.8	Penyakit Mulut di Tingkat Primer
	400.7.2.9	Pembiayaan Darah
	400.7.2.10	Penggunaan Darah Rasional
	400.7.2.11	Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah
	400.7.2.12	Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil, dan Kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi Puskesmas
	400.7.2.14	Pusk esmas Berprestasi
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan
	400.7.3.1	Pelayanan Kesehatan Rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan Rumah Sakit Privat
	400.7.3.4	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.7.3.7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa
	400.7.3.8	Badan Pengawas Rumah Sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
400.7.4	Keperawatan dan Keteknisian Medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina Pelayanan Kebidanan
400.7.5	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan Imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan Toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan Sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan Jiwa di Nonfasilitas Pelayanan Kesehatan
	400.7.6.2	Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan Asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Sejenisnya
	400.7.6.6	Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina Kesehatan dan Kesehatan di Pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan Matra
400.7.8	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian Tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual
	400.7.8.3	Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut
	400.7.8.4	Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian Kusta dan Frambusia
400.7.9	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian Malaria
	400.7.9.2	Pengendalian Arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian Zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
400.7.10	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
	400.7.10.1	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
	400.7.10.2	Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
	400.7.10.3	Penyakit Kanker
	400.7.10.4	Penyakit Kronis dan Generatif
	400.7.10.5	Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
400.7.11	Penyehatan Lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan Tempat Umum
	400.7.11.3	Kawasan dan Sanitasi Darurat
	400.7.11.4	Higien Sanitasi Pangan
	400.7.11.5	Pengamanan Limbah, Udara, Radiasi
400.7.12	Pengembangan Teknologi Laboratorium dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi Makro
	400.7.13.2	Gizi Mikro
	400.7.13.3	Gizi Klinik dan Dietetik

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.7.13.4	Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan Gizi
400.7.14	Kesehatan Ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan Ibu Hamil
	400.7.14.2	Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
	400.7.14.3	Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga Berencana
	400.7.14.5	Perlindungan Kesehatan Reproduksi
400.7.15	Kesehatan Anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan Hidup Bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan Anak Balita dan Prasekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko
	400.7.15.4	Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja
	400.7.15.5	Perlindungan Kesehatan Anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan Tradisional Keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan Tradisional Ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan Alternatif dan Komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan Kemitraan
400.7.17	Kesehatan Kerja dan Olahraga	
	400.7.17.1	Pelayanan Kesehatan Kerja
	400.7.17.2	Kapasitas Kerja
	400.7.17.3	Lingkungan Kerja
	400.7.17.4	Kemitraan Kesehatan Kerja
	400.7.17.5	Kesehatan Perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan Olahraga
400.7.18	Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	
	400.7.18.1	Harga Obat Publik
	400.7.18.2	Pengadaan Obat
	400.7.18.3	Perbekalan Kesehatan
400.7.19	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	
	400.7.19.1	Alat Kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat
	400.7.19.3	Produk Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan Kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi Klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan Obat Rasional
400.7.21	Produksi dan Distribusi Kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat Tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan Makanan
	400.7.21.3	Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi, dan Sediaan Farmasi Khusus
	400.7.21.4	Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi, dan Perizinan	
	400.7.22.1	Surat Keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan Perizinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap Darurat dan Pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan Informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya Data NHA Setiap Tahun
	400.7.24.2	Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		400.7.25.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan
		400.7.25.2	Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan
	400.7.26	Kesehatan Haji	
		400.7.26.1	Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
		400.7.26.2	Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
	400.7.27	Promosi Kesehatan	
		400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
		400.7.27.2	Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran
		400.7.27.3	Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan
		400.7.27.4	Hari Kesehatan
	400.7.28	Data dan Informasi	
		400.7.28.1	Statistik Kesehatan
		400.7.28.2	Analisis dan Diseminasi Informasi
		400.7.28.3	Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
		400.7.29.1	Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik
		400.7.29.2	Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen
		400.7.29.3	Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
		400.7.30.1	Penilaian Keamanan Pangan
		400.7.30.2	Standardisasi Produk Pangan
		400.7.30.3	Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan
		400.7.30.4	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
		400.7.30.5	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
	400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
	400.8.1	Kebijakan di Bidang Agama dan Kepercayaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.8.2	Fasilitasi	
		400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota
		400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
		400.8.3.1	Kelembagaan dan Kepercayaan
		400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4	Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL		
	400.9.1	Kebijakan di Bidang Sosial yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
		400.9.2.1	Kesejahteraan Sosial Anak Balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial	

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		400.9.3.1	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Tubuh dan Bekas Penderita Penyakit Kronis, Netra dan Rungu Wicara, Mental
		400.9.3.2	Kelembagaan dan Advokasi Sosial
		400.9.3.3	Asistensi dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
		400.9.4.1	Gelandangan, Pengemis, dan Pemulung
		400.9.4.2	Tuna Susila dan Korban <i>Trafficking</i> Perempuan
		400.9.4.3	Warga Binaan Lembaga Masyarakat Meliputi Penyiapan, Reintegrasi
		400.9.4.4	Pelayanan Sosial Orang dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
	400.9.6	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	
		400.9.6.1	Pelayanan Sosial Dalam dan Luar Panti
		400.9.6.2	Pengembangan Kelembagaan Meliputi Pembinaan Lembaga, Kerja Sama Lembaga
		400.9.6.3	Advokasi dan Pelayanan Sosial Kedaruratan
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
		400.9.9.1	Ketahanan Sosial Masyarakat Meliputi Keresasian Sosial, Penguatan Sumber Daya
		400.9.9.2	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
		400.9.9.3	Pemulihan Sosial Meliputi Penguatan Sosial, Reintegrasi Sosial
		400.9.9.4	Kerja Sama Meliputi Kerja Sama Pemerintah, Kerja Sama Nonpemerintah
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
		400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan Mitigasi
		400.9.10.2	Tanggap Darurat Meliputi Bantuan Darurat, Advokasi Sosial
		400.9.10.3	Pemulihan Sosial dan Penguatan Sosial
		400.9.10.4	Kerja Sama
	400.9.11	Jaminan Sosial	
		400.9.11.1	Seleksi dan Verifikasi
		400.9.11.2	Asuransi Kesejahteraan Sosial Meliputi Kelembagaan, Pengelolaan Premi
		400.9.11.3	Bantuan Langsung dan Tunjangan Berkelanjutan Meliputi Pendampingan dan Penyaluran
		400.9.11.4	Kerja Sama
	400.9.12	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial	
		400.9.12.1	Ketahanan Keluarga
		400.9.12.2	Asistensi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
		400.9.12.3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial
		400.9.12.4	Kemitraan Dunia Usaha
		400.9.12.5	Karang Taruna Meliputi Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas
	400.9.13	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	
		400.9.13.1	Persiapan Pemberdayaan
		400.9.13.2	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
		400.9.13.3	Penggalian dan Pengembangan Potensi
		400.9.13.4	Keresasian dan Penguatan Komunitas Adat Terpencil
		400.9.13.5	Kerja Sama Kelembagaan
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
		400.9.14.1	Identifikasi dan Analisis
		400.9.14.2	Pengembangan Kapasitas
		400.9.14.3	Penataan Sosial Lingkungan Kumuh
		400.9.14.4	Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas
		400.9.14.5	Bantuan Langsung
		400.9.14.6	Kerja Sama Kelembagaan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP	
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	
		400.9.15.1	Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan
		400.9.15.2	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
		400.9.15.3	Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
		400.9.15.4	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	400.10.1	Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
		400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
		400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
		400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
		400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
		400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
		400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
		400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
		400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
	400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
		400.10.4.1	Budaya Nusantara
		400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
		400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
		400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
		400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
		400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
		400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
		400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
		400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
		400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
	400.10.6	Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	
		400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
		400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
		400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
		400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerja Sama Teknologi Perdesaan
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
	400.11.1	Kebijakan di Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.11.2	Pertamanan	
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
		400.11.2.2	Taman Kota
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman	
		400.11.2.1	Perencanaan Pemakaman
		400.11.2.2	Pemakaman
		400.11.2.3	Pelayanan Pemakaman
	400.11.4	Jalur Hijau	
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
		400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
		400.11.4.3	Jalur Hijau Penvempurna dan Tepian Air
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
	400.11.7	Pengelolaan Data	
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.12.1	Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk
	400.12.2.1	Identitas Penduduk
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antarneegara
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3	Pencatatan Sipil
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
	400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
	400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring, dan Evaluasi
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan
	400.12.6.1	Indikator Kependudukan
	400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
	400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
	400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Nonpemerintah
	400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.13	KELUARGA BERENCANA	
	400.13.1	Kebijakan di Bidang Keluarga Berencana yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.13.2	Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
	400.13.2.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	400.13.2.2	Evaluasi dan Pelaporan
	400.13.3	Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
	400.13.3.1	Penyiapan Fasilitas
	400.13.3.2	Evaluasi dan Pelaporan
	400.13.4	Profil dan Proyeksi Penduduk
	400.13.4.1	Data Profil dan Proyeksi Penduduk
	400.13.4.2	Evaluasi Data Profil dan Proyeksi Penduduk
	400.13.5	Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
	400.13.5.1	Penetapan Sasaran Parameter
	400.13.5.2	Evaluasi Sasaran Parameter
	400.13.6	Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk
	400.13.6.1	Pemanfaatan Profil dan Proyeksi
	400.13.6.2	Pemanfaatan Parameter
	400.13.7	Pengembangan Sistem
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.8	Pengembangan Materi
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
	400.13.10	Analisis Sosial
	400.13.11	Analisis Ekonomi
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
	400.13.15	Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
	400.13.16	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
	400.13.16.1	Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
	400.13.17	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta
	400.13.18	Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta
	400.13.19	Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
	400.13.19.1	Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
	400.13.20	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
	400.13.20.1	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
	400.13.20.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan
	400.13.21	Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
	400.13.21.1	Peningkatan Akses Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
	400.13.21.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
	400.13.22	Kesertaan Keluarga Berencana Pria
	400.13.22.1	Peningkatan Akses Keluarga Berencana Pria
	400.13.22.2	Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana Pria
	400.13.23	Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
	400.13.25	Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas
	400.13.26	Pelebagaan Bina Keluarga Balita dan Anak
	400.13.26.1	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak
	400.13.26.2	Pengembangan Kemitraan Bina Keluarga dan Anak
	400.13.27	Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balitadan Anak
	400.13.27.1	Monitoring Bina Keluarga Balita dan Anak
	400.13.27.2	Evaluasi dan Pelaporan Bina Keluarga Balita dan Anak
	400.13.28	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja
	400.13.28.1	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Pendidikan
	400.13.28.2	Pelebagaan Bina Ketahanan Remaja Jalur Masyarakat
	400.13.29	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja
	400.13.29.1	Monitoring Bina Ketahanan Remaja
	400.13.29.2	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Remaja
	400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan
	400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32	Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.2	Evaluasi dan Pelaporan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.33	Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga
	400.13.34	Peningkatan Teknologi dan Permodalan Usaha Ekonomi Keluarga
	400.13.35	Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga
	400.13.35.1	Pengembangan Administrasi dan Keuangan Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
	400.13.35.2	Pengembangan Pemasaran Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga
	400.13.36	Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga
	400.13.37	Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2	Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.40	Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
	400.13.40.1	Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
	400.13.40.2	Evaluasi dan Pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
	400.13.41	Advokasi dan Pencitraan
	400.13.42	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
	400.13.42.1	Promosi
	400.13.42.2	Sarana Produksi Media Komunikasi
	400.13.42.3	Produk Media Komunikasi
	400.13.43	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi
	400.13.44	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
	400.13.44.1	Pengembangan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
	400.13.44.2	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
	400.13.45	Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah
	400.13.45.2	Penguatan Hubungan dengan Lembaga Nonpemerintah
	400.13.46	Tenaga Lini Lapangan
	400.13.36.1	Pengembangan Tenaga Lini Lapangan
	400.13.36.2	Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan
	400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan
	400.13.47.1	Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan
	400.13.47.2	Monitoring dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan
	400.13.48	Mekanisme Operasional Lini Lapangan
	400.13.48.1	Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
	400.13.48.2	Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan
	400.13.49	Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan
	400.13.49.1	Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan
	400.13.49.2	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
	400.13.50	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	400.13.51	Analisis dan Evaluasi

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		400.13.51.1	Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk
		400.13.51.2	Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	400.13.52	Sistem Aplikasi dan Bank Data	
		400.13.52.1	Pengembangan Sistem Aplikasi
		400.13.52.2	Pengelolaan Bank Data
	400.13.53	Infrastruktur Teknologi Informasi	
		400.13.53.1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi
		400.13.53.2	Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
	400.13.54	Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi	
		400.13.54.1	Dokumentasi dan Perpustakaan
		400.13.54.2	Pengelolaan Situs BKKBN dan Media Konferensi
400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT		
	400.14.1	Keprotokolan	
		400.14.1.1	Penyelenggaraan Acara Kedinasan (Upacara, Pelantikan, Peresmian, dan Jamuan, Termasuk Acara Peringatan Hari-Hari Besar)
		400.14.1.2	Buku Tamu Keprotokolan
		400.14.1.3	Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah
		400.14.1.4	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri
	400.14.2	Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat	
	400.14.3	Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, Acara Kedinasan dan Peristiwa-Peristiwa Bidang Masing-Masing, dalam Berbagai Media: Kertas, Foto/Video/Rekaman Suara/Multimedia	
	400.14.4	Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Informasi Kelembagaan	
		400.14.4.1	Kliping Koran
		400.14.4.2	Brosur /Leaflet/ Poster/Plakat
		400.14.4.3	Pengumuman/Pemberitaan
	400.14.5	Hubungan Antarlembaga dan Pemerintahan Daerah	
		400.14.5.1	Hubungan Antarlembaga Pemerintah
		400.14.5.2	Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM
		400.14.5.3	Hubungan dengan Perusahaan
		400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, Termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
		400.14.5.5	Forum Kehumasan
		400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
	400.14.6	Dengar Pendapat/ <i>Hearing</i> DPRD	
	400.14.7	Bahan/Materi Pidato/Sidang Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota	
	400.14.8	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran, dan Jurnal	
	400.14.9	Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik	
	400.14.10	Pameran/Sayembara/ Lomba /Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	
	400.14.11	Penghargaan /Tanda Kenang-Kenangan	
	400.14.12	Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	
500	PEREKONOMIAN		
	500.1	KETAHANAN PANGAN	
	500.1.1	Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Daerah	
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
		500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
		500.1.2.2	Akses Pangan
		500.1.2.3	Kerawanan Pangan
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan	
		500.1.3.1	Distribusi Pangan
		500.1.3.2	Harga Pangan
		500.1.3.3	Cadangan Pangan
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	
		500.1.4.1	Konsumsi Pangan
		500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
	500.1.7	Bimbingan Teknis
	500.1.8	Evaluasi
500.2	PERDAGANGAN	
	500.2.1	Kebijakan di Bidang Perdagangan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2	Bina Usaha Jasa Perdagangan
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerja Sama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
	500.2.3	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1	Kelembagaan dan Informasi Standar
	500.2.3.2	Kerja Sama Standardisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan Penerapan Standar
	500.2.3.4	Tata Usaha
	500.2.3.5	Kerja Sama, Informasi, dan Publikasi
	500.2.3.6	Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha
	500.2.3.8	Fasilitas Kelembagaan
	500.2.3.9	Produk Pertambangan dan Aneka Industri
	500.2.3.10	Produk Pertanian, Kimia, dan Kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerja Sama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerja Sama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan Penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi
	500.2.4.1	Pengkajian Pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian Pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem Informasi
	500.2.4.7	Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang
	500.2.4.8	Pengawasan Pasar Lelang
	500.2.4.9	Pengawasan Sistem Gudang
	500.2.5	Bimbingan Teknis
	500.2.6	Evaluasi
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
500.3.1	Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3	Produksi	
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan	
	500.3.4.1	Program Pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
	500.3.4.3	Urusan Permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sistem Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antarlembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	
500.4	KEHUTANAN	
500.4.1	Kebijakan di Bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.4.2	Penyuluhan	
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan
	500.4.2.3	Program Penyuluhan
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8	Diseminasi
	500.4.2.9	Evaluasi dan Laporan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.4.3	Planologi Kehutanan
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	500.4.4	Bina Usaha Kehutanan
	500.4.4.1	Data Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi Nonkayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Nonkayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Pengamanan Hutan
	500.4.6.6	Penyidikan dan Perlindungan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
500.5.1	Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5.2	Perikanan Tangkap	
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budi Daya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan Ikan Air Tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budi Daya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budi Daya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budi Daya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budi Daya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budi Daya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budi Daya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Nonkonsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengendalian Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Nonhayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawasan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan Lahu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan Lahu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.5.7.15	Rekomendasi
		500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
		500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
		500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
		500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
		500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN		
	500.6.1	Kebijakan di Bidang Pertanian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.6.2	Perlindungan Hortikultura	
		500.6.2.1	Teknologi Perlindungan Tanaman Buah
		500.6.2.2	Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		500.6.2.3	Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura
		500.6.2.4	Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
		500.6.3.1	Penilaian Varietas
		500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
		500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
		500.6.4.1	Basis Data Lahan
		500.6.4.2	Pengendalian Lahan
		500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi, dan Konservasi Lahan
		500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
		500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
		500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
		500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
		500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air, dan Lingkungan Hidup
		500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
		500.6.6.1	Data Informasi Pembiayaan Program
		500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
		500.6.6.3	Pembiayaan Agribisnis
		500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
	500.6.7	Pupuk Pestisida	
		500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
		500.6.7.2	Pupuk Anorganik
		500.6.7.3	Pestisida
		500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
		500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
		500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
		500.6.9.2	Produksi Benih Sereal
		500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
		500.6.9.4	Kelembagaan Benih
	500.6.10	Budi Daya Sereal	
		500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
		500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
		500.6.10.3	Jagung
		500.6.10.4	Sereal Lain
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
		500.6.11.1	Kedelai
		500.6.11.2	Ubi Kayu
		500.6.11.3	Aneka Kacang
		500.6.11.4	Aneka Umbi
	500.6.12	Tanaman Pangan	
		500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
		500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
		500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
		500.6.13.1	Padi
		500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain
		500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
		500.6.12.4	Aneka Umbi
	500.6.14.	Pengolahan Hasil Pertanian	
		500.6.14.1	Tanaman Pangan
		500.6.14.2	Hortikultura
		500.6.14.3	Perkebunan
		500.6.14.4	Peternakan
	500.6.15	Mutu dan Standardisasi	
		500.6.15.1	Standardisasi
		500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
		500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
		500.6.15.4	Kerja Sama dan Harmonisasi
	500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
		500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
		500.6.16.2	Investasi
		500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
		500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
	500.6.17	Pemasaran Domestik	
		500.6.17.1	Informasi Pasar
		500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
		500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
		500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
	500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja, dan Surat-Menyurat	
	500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
		500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
		500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
	500.6.20	Diseminasi	
	500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian./Pengkajian	
		500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
		500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi Lainnya
	500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
	500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
	500.6.25	Evaluasi Penelitian /Pengkajian dan Pengembangan	
	500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		500.6.26.1	Hak Cipta
		500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
		500.6.26.3	Hak Paten Biasa
		500.6.26.4	Hak Merek
		500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
		500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
		500.6.26.7	Permohonan HaKI yang Ditolak
	500.6.27	Pelayanan Perizinan Pertanian	
		500.6.27.1	Sarana I (Bidang Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian)
		500.6.27.2	Sarana II (Bidang Benih Tanaman, Bahan Penelitian, Teknis Pangan Segar Asal Tumbuhan, Teknis Pengalihan Saham Perkebunan)
		500.6.27.3	Sarana III (Bidang Bibit, Karkas, Daging, dan Jeroan, Pakan Ternak, Obat Hewan, dan Teknis Sumber Daya Genetik Ternak)

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP	
	500.6.28	Pelayanan Hukum	
		500.6.28.1	Sertifikasi
		500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
	500.6.29	Karantina Pertanian	
		500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
		500.6.29.2	Karantina Hewan
	500.6.30	Bimbingan Teknis	
	500.6.31	Evaluasi	
500.7	PETERNAKAN		
	500.7.1	Kebijakan di Bidang Peternakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		500.7.2.1	Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Nonruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
		500.7.2.2	Pakan Ternak
		500.7.2.3	Budi Daya Ternak
		500.7.2.4	Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan (Permanen), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan (Permanen), Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
		500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen (Permanen), Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitari dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan (Permanen), Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.3	Bimbingan Teknis	
	500.7.4	Evaluasi	
500.8	PERKEBUNAN		
	500.8.1	Kebijakan di Bidang Perkebunan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.8.2	Tanaman Semusim	
		500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
		500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
		500.8.2.3	Budi Daya Teknologi Budi Daya Tanaman Semusim
		500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3	Tanaman Rempah dan Penyegar	
		500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
		500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar
		500.8.3.3	Budi Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
		500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.4	Tanaman Tahunan	
		500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
		500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
		500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
		500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan	
		500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
		500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
		500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
		500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
		500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
		500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
		500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan	
500.9	PERINDUSTRIAN		
	500.9.1	Kebijakan di Bidang Perindustrian yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	
		500.9.2.1	Industri Manufaktur
		500.9.2.2	Industri Agro
		500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.3	Promosi Industri	
		500.9.3.1	Industri Manufaktur
		500.9.3.2	Promosi Industri Agro
		500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
		500.9.4.1	Industri Manufaktur
		500.9.4.2	Industri Agro
		500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual	
		500.9.5.1	Industri Manufaktur
		500.9.5.2	Industri Agro
		500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.6	Industri Hijau	
		500.9.6.1	Industri Manufaktur
		500.9.6.2	Industri Agro
		500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
		500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
	500.9.10	Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri	
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
	500.9.12	Standardisasi	
		500.9.12.1	Standar
		500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
		500.9.12.3	Infrastruktur Standar
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
		500.9.13.1	Kebijakan Industri
		500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
		500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
		500.9.14.1	Industri Hijau
		500.9.14.2	Lingkungan Hidup
		500.9.14.3	Energi
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
		500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
		500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
		500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	500.10.1	Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.2.3	Pertambangan
	500.10.2.4	Panas Bumi
	500.10.2.5	Geosains
	500.10.2.6	Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic</i> (TDEM)
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
	500.10.3	Penelitian Kegeologian
	500.10.3.1	Administrasi Pelaksanaan Penelitian
	500.10.3.2	Administrasi Tenaga Penelitian
	500.10.3.3	Administrasi Penggunaan Peralatan Penelitian
	500.10.3.4	<i>Log-Book</i> Peralatan Survei/Peralatan Uji/Kalibrasi
	500.10.3.5	Hasil Penelitian dan Penyelidikan Kegeologian
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
	500.10.4	Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
	500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas, serta Kebakaran Batu Bara
	500.10.5.4	Survei Geologi
	500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Nonkonvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk Presentasi Makalah, Publikasi Makalah, Pembukaan Data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (Publikasi Makalah, Analisa Laboratorium, <i>Reprocessing</i>), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi
		500.10.7.4	Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
		500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
		500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
		500.10.7.7	Partisipasi <i>Interest</i>
		500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
	500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.8.1	Perumusan Pedoman, Prosedur, Layanan, serta Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/Rekomendasi/Penandasahan), Pengawasan
		500.10.8.2	Fasilitasi dan Pertimbangan Pelanggaran
		500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang Ditetapkan dengan Keputusan Menteri
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
		500.10.9.1	Perumusan Pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
		500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas Permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
		500.10.9.3	Buku Register <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>
		500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
		500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
		500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
		500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
		500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Calon Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
		500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
		500.10.9.10	Usaha Penunjang
	500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
		500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS) dan <i>Procedure Qualification Record</i> (PQR) dan Kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan Kapasitas Usaha Panas Bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi, dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi / Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi Hasil Audit Energi melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Manajemen Energi di Pengguna Energi di atas 6.000 TOE

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.10.15.4	Pengawasan Sertifikasi Label dan Tanda Hemat Energi pada Lampu Swabalast
		500.10.15.5	Penyusunan Daftar Peralatan/Teknologi Efisiensi
		500.10.15.6	Penyusunan Emisi Energi Gas Rumah Kaca
		500.10.15.7	Pemberian Insentif dan Disinsentif Konservasi Energi
		500.10.15.8	Profil Investasi Efisiensi Energi
		500.10.15.9	<i>Investment Grade Audit</i> (IGA)
		500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
	500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
		500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
		500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
		500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
		500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
	500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
		500.10.17.1	Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, antara lain: Dokumen Grant/Hibah/ <i>Loan Agreement</i> Luar Negeri, <i>Monitoring Loan</i> Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Penanganan Permasalahan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik, Laporan Kegiatan Investasi, dan Pendanaan Tenaga Listrik
		500.10.17.2	Pengembangan Listrik Pedesaan, antara lain: Data Program Listrik Pedesaan, Data Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan Evaluasi Listrik Pedesaan, Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu
		500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
	500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
		500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
		500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
		500.10.18.3	Hubungan Komersial Tenaga Listrik
		500.10.18.4	Perlindungan Konsumen Listrik, antara lain: Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik, Dokumen Pengawasan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Realisasi Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik, Dokumen Evaluasi Pemberian Kompensasi Pinalti Tingkat Mutu Pelayanan PT PLN (Persero)
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
		500.10.19.1	Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan
		500.10.19.2	Penyiapan Kompetensi dan Pengawasan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
		500.10.19.3	Usaha Penunjang Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
		500.10.19.4	Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Forum Keselamatan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Ketenagalistrikan, Laporan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan, Dokumen Perhitungan Faktor Emisi Clean Development Mechansim (CDM)
	500.10.20	Sertifikasi	
		500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
		500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21		Akreditasi Ketenagalistrikan
500.10.22		Standarisasi Kompetensi
500.10.23		Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
	500.10.23.1	Perumusan Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum Konsensus Rancangan SNI Bidang Ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen Pengawasan Penerapan SNI Wajib Bidang Ketenagalistrikan
500.10.24		Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.1	Klasifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen Penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan Berkala Pemegang Penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan Hasil Pengawasan Penunjukan
500.10.25		Bina Program Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan, dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batu Bara melalui Lelang Reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batu Bara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara
500.10.26		Pembinaan Pengusahaan Mineral
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan Masyarakat sekitar Tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
	500.10.26.5	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Mineral
	500.10.26.6	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral (Logam, Bukan Logam Batuan, Radioaktif, dan Mineral Jarang)
	500.10.26.7	Perizinan Usaha Pertambangan Mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan Barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris pada Perusahaan Mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada Pengusaha Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Mineral
	500.10.26.14	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Awal Sampul dengan Rancangan Akhir
	500.10.26.15	Pelaporan Usaha Pertambangan Mineral
	500.10.26.16	Penghargaan Usaha Pertambangan Mineral
	500.10.26.17	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27		Pembinaan Pengusahaan Batu Bara
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.10.27.3	Penyelesaian Perselisihan Usaha Pertambangan Batu Bara
		500.10.27.4	Rekomendasi Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara
		500.10.27.5	Laporan/Data Kegiatan Eksplorasi Batu Bara
		500.10.27.6	Pengawasan Produksi dan Pemasaran Batu Bara (Bitumen Padat, Batuan Aspal, Batu Bara dan Gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batu Bara PKP2B, IUP, hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batu Bara
		500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batu Bara
		500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)
		500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Aset Perusahaan Batu Bara
		500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
		500.10.27.11	Persetujuan Perubahan Saham Direksi, Komisaris, pada Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)
		500.10.27.12	Teguran kepada Pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B)
		500.10.27.13	Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait Usaha Pertambangan Batu Bara
		500.10.27.14	Pedoman/Petunjuk Teknis Pertambangan Mineral Termasuk Rancangan Swal Sampul dengan Rancangan Akhir
		500.10.27.15	Pelaporan Usaha Pertambangan Batu Bara
		500.10.27.16	Penghargaan Usaha Pertambangan Batu Bara
		500.10.27.17	Penerbitan Sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara
	500.10.28	Penerimaan Negara	
		500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
		500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
		500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBPN
	500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara	
		500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNi (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: <i>Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)</i>
		500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
		500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
		500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/ Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		500.10.29.5	Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi
		500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
		500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
		500.10.29.8	Rekomendasi Bahan Kimia
		500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pascatambang

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.10.29.10	Laporan Berkala Teknik dan Lingkungan Pertambangan/Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi
		500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan, dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
		500.10.29.12	Pengawasan Lingkungan Pertambangan
		500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara
		500.10.29.14	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batu Bara
		500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis
		500.10.29.16	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis
		500.10.29.17	Pengawasan Teknis
		500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batu Bara
		500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan
	500.10.30		Program Penelitian dan Pengembangan
		500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
		500.10.30.2	Pengembangan dan Inovasi
		500.10.30.3	Dokumen Penerapan/ Pemanfaatan/ Pendayagunaan/ Replikasi/ Prototipe Hasil Penelitian/ Pengkajian/ Pengembangan/ Inovasi
		500.10.30.4	Advokasi dan Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
		500.10.30.5	Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.10.30.6	Pembinaan Penelitian/Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.10.30.8	Data dan Informasi Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.10.30.9	Master Proceeding/ Jurnal Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		500.10.30.10	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
		500.10.30.11	Forum Komunikasi Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
		500.10.30.12	Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK
		500.10.30.13	Sertifikasi Personil Peneliti Bidang Sumber Daya Mineral
	500.10.31		Sarana Litbang
		500.10.31.1	Administrasi Penggunaan Peralatan
		500.10.31.2	Log-Book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
	500.10.32		Afiliasi
		500.10.32.1	Proyek Percontohan
		500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
		500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
		500.10.32.4	Penyajian Informasi
	500.10.33		Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
		500.10.33.1	Pemetaan dan Penelitian Geologi, Geokimia, dan Geofisika Kelautan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan Kewilayahan Pantai
	500.10.33.3	Penelitian Sumber Daya Energi dan Mineral Kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batu Bara
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batu Bara
500.10.36		Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
	500.10.36.1	Energi Baru Terbarukan
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
500.11	PERHUBUNGAN	
	500.11.1	Kebijakan di Bidang Perhubungan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan
	500.11.2.1	Penentuan Lokasi Terminal Barang Tipe Pengumpul dan Tipe Penunjang
	500.11.2.2	Penentuan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C
	500.11.2.3	Penerapan Lokasi Terminal Barang Utama
	500.11.2.4	Standar Pelayanan Minimal Pengoperasian Terminal
	500.11.2.5	Jaringan Trayek Angkutan Antarkota/Provinsi
	500.11.2.6	Jaringan Lintas pada Jaringan Jalan Primer
	500.11.2.7	Penetapan Kelas Jalan Primer
	500.11.2.8	Kualifikasi Teknis Petugas Terminal
	500.11.2.9	Jaringan Transportasi Jalan Sekunder
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan
	500.11.3.1	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.3.2	Pengembangan Transportasi Jalan
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor
	500.11.4.1	Pengesahan Hasil Uji Tipe Kendaraan Bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor
	500.11.5.1	Sertifikasi Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Kendaraan Bermotor
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	500.11.6.1	Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Nasional di Luar Kawasan Perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional
	500.11.7	Perlengkapan Jalan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.11.7.1	Pedoman Teknis Perlengkapan Jalan
	500.11.7.2	Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
	500.11.7.3	Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi Teknis Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi
	500.11.8.2	Izin Trayek Angkutan Penumpang untuk Trayek Lintas Batas Negara
	500.11.8.3	Izin Trayek antar Kota antar Provinsi
	500.11.8.4	Izin Operasi Angkutan Pariwisata dan Angkutan Penumpang tidak dalam Trayek yang Wilayah Peñyanannya Bersifat Lintas Batas Negara dan Antarkota/Provinsi
	500.11.8.5	Penilaian Kinerja Perusahaan Angkutan Umum
	500.11.8.6	Pemberian Subsidi Angkutan Umum
	500.11.8.7	Angkutan Perintis
	500.11.8.8	Penghargaan Perusahaan Angkutan Umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.9.2	Tarif Angkutan Barang
	500.11.9.3	Izin Operasi Angkutan Barang Tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan Angkutan Barang
	500.11.9.5	Izin Dispensasi Angkutan Jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, Penertiban, dan Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Operasional Kendaraan Angkutan Umum yang Menjadi Kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta Informasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.13.1	Pengembangan dan Penetapan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Peta Jaringan, <i>Blueprint</i> Jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.15.1	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawasan dan Registrasi Sarana Angkutan Sungai, dan Danau dan Penyeberangan
500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.11.16.1	Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.16.2	Pemberian Sertifikasi Pelabuhan Penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.17		Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.18.1	Manajemen Lalu Lintas
	500.11.18.2	Tata Cara Berlalu Lintas di Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau
	500.11.18.4	Sertifikasi Inspektur Sungai dan Danau dan Pejabat Pemberangkatan Angkutan Sungai dan Danau
500.11.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.19.1	Pengerukan Alur Pelayaran Sungai, Danau, dan Kolam Pelabuhan Penyeberangan
	500.11.19.2	Penetapan Kelas Alur dan Peta Alur Pelayaran Sungai dan Danau
	500.11.19.3	Perambuan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.20.1	Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.20.2	Persetujuan Operasi Kapal Penyeberangan di Lintas Nasional dan Internasional
500.11.21		Tarif dan Keperintisan
	500.11.21.1	Perhitungan Tarif, Pemantauan Tarif Angkutan dan Jasa Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.21.2	Kriteria dan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan
500.11.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2	Transportasi Perkotaan yang Berbasis Jalan, Jalan Rel dan Perairan Daratan
	500.11.22.3	Transportasi Perkotaan untuk Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
500.11.23		Lalu Lintas Perkotaan
	500.11.23.1	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan
	500.11.23.3	Penanganan Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Teknologi di Wilayah
500.11.24		Angkutan Perkotaan
	500.11.24.1	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dalam Trayek
	500.11.24.2	Jaringan Trayek Perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
500.11.25		Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan
	500.11.25.1	Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek untuk Angkutan Penumpang dan/ atau Barang
	500.11.25.2	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan yang Menghubungkan Antarsimpul (Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal) di Kawasan Perkotaan yang Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
	500.11.25.3	Penentuan dan Pemenuhan Alokasi Kebutuhan Angkutan Perkotaan Tidak dalam Trayek yang Wilayah Pelayanannya Melebihi Satu Wilayah Administrasi Provinsi
500.11.26		Dampak Transportasi Perkotaan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.11.26.1	Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Berwawasan Lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan Dampak Transportasi di Kawasan Perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan Pengembangan Teknologi Transportasi Ramah Lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Kota
	500.11.26.5	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional dalam Kawasan Perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan Transportasi Perkotaan
500.11.27	Monitoring dan	Evaluasi Manajemen Keselamatan
	500.11.27.1	Monitoring dan Evaluasi Data Kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi Unit Pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.28	Pengembangan	Keselamatan
	500.11.28.1	Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi Kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan	Keselamatan
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan: Penyuluhan, Publikasi dan Destinasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan Keselamatan Antarlembaga dan Masyarakat di Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan	Angkutan Umum
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan Awak Kapal Sungai dan Danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman Audit Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia
	500.11.31.2	Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Jalan dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.31.3	Audit Faktor Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Laik Fungsi Jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman Keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi Keselamatan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Pelaku Transportasi Jalan dan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi Kecelakaan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta Laik Fungsi Jalan
500.11.33	Parkir	
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin Tempat Khusus Parkir Swasta
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	500.12.1	Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.12.2	Telekomunikasi
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3	Penyiaran
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.1	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Nonpemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	<i>e-Government</i>	
	500.12.6.1	Tata Kelola <i>e-Government</i>
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-Government</i>
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	<i>e-Business</i>	
	500.12.7.1	Tata Kelola <i>e-Business</i>
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi <i>e-Business</i>
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan <i>e-Business</i>
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data	
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
500.12.17	Pusat Kerja Sama	
	500.12.17.1	Kerja Sama Daerah

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
	500.12.18	Pusat Informasi	dan Hubungan Masyarakat
		500.12.18.1	Pelayanan Informasi
		500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
		500.12.18.3	Bimbingan Teknis
	500.12.19	Evaluasi	
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
	500.13.1	Kebijakan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
		500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
		500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
		500.13.2.3	Industri Pariwisata
		500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
		500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i>
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
		500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
		500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
		500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
		500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
		500.13.4.1	Pengembangan Industri Perfilman
		500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
		500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	
		500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
		500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
		500.13.5.3	Kerja Sama dan Fasilitas
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
		500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
		500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK		
	500.14.1	Kebijakan di Bidang Statistik yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	
		500.14.2.1	Perencanaan
		500.14.2.2	Persiapan, antara lain: Penyusunan Rancangan Organisasi Kegiatan Sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan Konsep dan Definisi, Penyusunan Metodologi (Cakupan, Organisasi, Lapangan, Ukuran Statistik, Prosedur), Penyusunan Buku Pedoman (Pencacahan, Pengawasan, Pengolahan), Penyusunan Peta Wilayah Kerja dan Muatan Peta Wilayah, Penyusunan Pedoman Sosialisasi, Sosialisasi Kegiatan kepada <i>Stakeholder</i> dan Sumber Data (<i>Leaflet</i> , Poster, Pertemuan), Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi (Intern dan Ekstern), Pelaksanaan Pelatihan Instruktur (TOT), Pelaksanaan Pelatihan Petugas, Penyusunan Program Pengolahan (<i>Ride</i> Validasi, Pemeriksaan Data Entri, Tabulasi), Pelatihan Petugas Pengolahan, Perancangan Tabel, Pelaksanaan Uji Coba
		500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
		500.14.2.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Dokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (Entri, <i>Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi
		500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.14.2.6	Diseminasi Hasil Sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan Listing, Pemilihan Sampel, Pengumpulan Data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring Kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan Fokumen (Penerimaan/Pengiriman, Pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan Dokumen dan Pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman Data (Entri, <i>Scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan Tabulasi, Laporan Konsistensi Tabulasi
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan Angka Hasil Pengolahan, Penyusunan Angka Sementara, Penyusunan Angka Tetap, Penyusunan/Pembahasan <i>Draft</i> Publikasi, Analisis Data, Penyusunan Publikasi
	500.14.3.6	Diseminasi Hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis Data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
	500.14.4.4	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
500.15	KETENAGAKERJAAN	
	500.15.1	Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerja Sama Antarlembaga
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
	500.15.6	Bina Pemagangan
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerja Sama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antarkerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerja Sama Antarlembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerja Sama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian, dan Sistem Manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.15.20.4	Kerja Sama Penegakan Hukum
500.15.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K3
	500.15.21.2	Hasil Kajian, Perencanaan dan Penerapan Teknologi, dan Alih Teknologi K3
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.3	Kerja Sama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.4	Kerja Sama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.5	Kerja Sama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16	PENANAMAN MODAL	
	500.16.1	Kebijakan di Bidang Penanaman Modal yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
	500.16.3	Pengembangan iklim Penanaman Modal
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
	500.16.7.2	Pelayanan Perizinan
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perizinan
	500.16.7.4	Pelayanan Nonperizinan
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
500.17	PERTANAHAN	

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
500.17.1	Kebijakan di Bidang Pertanahan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
500.17.4	Sengketa Tanah	
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian
500.18	TRANSMIGRASI	
500.18.1	Kebijakan di Bidang Transmigrasi yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerja Sama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerja Sama Antar daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETEKNOLOGIAN	
600.1	PEKERJAAN UMUM	
600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air	
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
	600.1.2.2	Kelcmbagaan
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.3.2	Manajemen Mutu
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur
600.1.6	Pengendalian Lumpur (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Geodemetrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan Hak Pengusahaan Jalan Tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	
600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
600.2.1	Kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2	Analisa Teknik
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan Teknis dan Supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9		Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13		Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.13.1	Peningkatan Kerja Sama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja Sama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.16	Pengembangan Materi
	600.2.17	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.16.1	Antarsektor
	600.2.16.2	Antarwilayah
600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)	
600.3.1	Kebijakan di Bidang Tata Ruang yang Dilakukan Pemerintahan Daerah	
600.3.2	Perencanaan	
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2	Izin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang
600.3.4	Pemetaan	
	600.3.4.1	PetaDasar
	600.3.4.2	Survei Pemetaan Ruang Darat
	600.3.4.3	Survei Pemetaan Ruang Air
	600.3.4.4	Survei Pemetaan Ruang Udara
600.4	LINGKUNGAN HIDUP	
600.4.1	Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan Ekoregion, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
600.4.5	Dampak Lingkungan	
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan Sistem Kebijakan Dampak Lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat Mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim
		600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan, dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
		600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
	600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
		600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
	600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun
		600.4.13.1 Pengumpulan dan Pemanfaatan
		600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
		600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
		600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
	600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
		600.4.14.1 Pemantauan
		600.4.14.2 Tanggap Darurat dan Pemeliharaan Kontaminasi
	600.4.15	Pengelolaan Sampah
		600.4.15.1 Pembatasan Sampah
		600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
		600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
		600.4.15.4 Penetapan Pemenang Adipura
	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan
		600.4.16.1 Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan
		600.4.16.2 Penataan Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan
		600.4.17.1 Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan
		600.4.17.2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan
	600.4.18	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
		600.4.18.1 Penyidikan
		600.4.18.2 Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
		600.4.18.3 Koordinasi Pembinaan Penyidik PNS
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan
		600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
		600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat
		600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
		600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat
		600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
		600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
		600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
		600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan
		600.4.23.1 Pengelolaan Data
		600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
		600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
		600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan
		600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
		600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi
		600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
		600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
		600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
		600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
		600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN	

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
700.1	PENGAWASAN INTERNAL	
	0700.1.1	Rencana Pengawasan
		700.1.1.2 Rencana Strategis Pengawasan
		700.1.1.3 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
		700.1.1.4 Rencana Kinerja Tahunan
		700.1.1.5 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
		700.1.1.6 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	0700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
		700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL)
		700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut
		700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tidak Memerlukan Tindak Lanjut
		700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
		700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
		700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
		700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
		700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i>
		700.1.2.9 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
800	KEPEGAWAIAN	
	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA
		800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
		800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
		800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN, Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas
		800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
		800.1.1.4 Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
		800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
		800.1.2.1 Formasi ASN, antara lain: Usulan Formasi, Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
		800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
		800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
		800.1.2.4 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
		800.1.2.5 Pengangkatan ASN
		800.1.2.6 <i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)
		800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
		800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
		800.1.3 Mutasi Pegawai
		800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
		800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
		800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
	800.1.4	Pengembangan Karir
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi Lain/Pertukaran Antar-ASN dengan Pegawai Swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian Ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya
	800.1.7	Bantuan Hukum
	800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
	800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
	800.1.10	Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan, dan Pascadiklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honororer
	800.1.11	Administrasi Pegawai
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti di Luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
		800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
		800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
		800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
		800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
		800.1.12.3	Tabungan Perumahan
		800.1.12.4	Bantuan Sosial
		800.1.12.5	Pakaian Dinas
		800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
		800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
		800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
		800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
		800.1.12.10	Rekam Medis
	800.1.13	Administrasi Perseorangan	
		800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
		800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
		800.1.13.3	Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disetarakan
		800.1.13.4	Sekretaris Daerah
		800.1.13.5	ASN Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional
	800.1.14	Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	800.2.1	Kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang Dilakukan oleh Pemerintah daerah	
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
		800.2.2.1	Sistem Informasi Program dan Pembinaan Diklat
		800.2.2.2	Pedoman-Pedoman Kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-Kurikulum Diklat
		800.2.2.4	Modul-Modul Diklat
		800.2.2.5	Panduan Fasilitator
		800.2.2.6	Saran/Rekomendasi Penyelenggaraan Diklat
		800.2.2.7	Notulen Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan Evaluasi Program dan Pembinaan Diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat
	800.2.3	Widyaiswara	
		800.2.3.1	Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan Evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, Advokasi, dan Asistensi Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
		800.2.4.1	Perencanaan, Peserta, Pengajar, Penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, Advokasi, Asistensi Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.4	Pengembangan Bahan Ajar dan Metodologi Pembelajaran
		800.2.4.5	Sistem Informasi Diklat
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
		800.2.4.7	Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat
	800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN		
	900.1	KEUANGAN DAERAH	

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	
900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang Telah Disetujui Sekretaris Daerah	
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang Telah Disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D); UP, GU, TU, LS	
900.1.3.2	Pendapatan	
900.1.3.3	Belanja	
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	
900.1.3.7	Daftar Gaji	
900.1.3.8	Kartu Gaji	
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	
900.1.3.10	Laporan Keuangan	
900.1.4	Pinjaman/ Hibah Luar Negeri	
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	
900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	
900.1.4.3	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	
900.1.4.4	Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN), antara lain: <i>Draft Agreement</i> , <i>Legal Opinion</i> , Surat Menyurat dengan Lender	
900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana	
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN Berikut Lampirannya	
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM Beserta Lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung Lainnya)	
900.1.4.9	<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : <i>No Objection Letter</i> (NOL), <i>Project Implementation</i> , <i>Notification of Contract</i> , <i>Withdrawal Authorization</i> (WA)	
900.1.4.10	<i>Staff Appraisal Report</i>	
900.1.4.11	<i>Report</i> /Laporan	
900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	
900.1.4.13	<i>Completion Report</i> / <i>Annual Report</i>	
900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, Termasuk Spesimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan Anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran Lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak Termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD, antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/ Pemilu Termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu Termasuk Diantaranya Bukti Transfer Bank
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu Termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
	900.1.12	Anggaran Daerah
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP
	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Standardisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Bimbingan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Analisis dan Evaluasi, Pemantauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Fasilitasi Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan, Fasilitas, serta Bimbingan Teknis di Bidang Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Nonkeuangan, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, Standardisasi Teknis, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan, Standardisasi Teknis, Prosedur dan Kriteria, Fasilitasi Serta Bimbingan Teknis Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan, Fasilitasi serta Bimbingan Teknis investasi Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kekayaan dan Investasi Daerah
	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Obligasi Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dana Bergulir yang Bersumber dari APBN, Bimbingan Teknis Obligasi Daerah, Dana Bergulir Serta Penyertaan Modal Daerah, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah, Obligasi Daerah dan Dana Bergulir, dan Penyertaan Modal Daerah
	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Penghitungan, dan Rekonsiliasi Dana Alokasi Umum, Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Umum, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Umum
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar. Sosialisasi dan Supervisi Dana Alokasi Khusus, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dana Alokasi Khusus
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi Penyiapan Data Dasar Perhitungan, dan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Sosialisasi dan Supervisi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Penyiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan Supervisi Dana Otonomi Khusus, Sosialisasi dan Supervisi dan Transfer Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya

KODE KLASIFIKASI			JENIS ARSIP
		900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan dan Perimbangan, Penyiapan Dukungan Teknis Dana Perimbangan, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Dana Perimbangan
		900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: Penyiapan Bahan Bantuan Keterangan Ahli di Bidang Keuangan Daerah, Penyiapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
		900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Penyiapan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Penyiapan Data dan Informasi untuk Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DAFTAR REGISTRASI		
NO	BENTUK/STATUS	REKOR
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	Asst. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
3	Kadis Perpustakaan	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HALIANA